

AKUNTABILITAS PEMIMPIN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA, FILSAFAT, PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI

Achmad Saefulrijal¹, Indri Lastriyani^{2*}, Faiz Fatkhullah¹, Ida Farida Fitriyani¹

¹Universitas Islam Nusantara Bandung

²Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

e-mail: indriastriyani@unlips.ac.id

Abstract: This study aims to describe and analyze the accountability of educational leaders based on religion, philosophy, psychology and sociology: (1). Based on the religion of Allah SWT as a result of an education that is fair, kind, satisfying, not deceptive, not against rules and not self-contradictory; (2). What is philosophically grounded is a moral responsibility to the rules of logical reasoning that arise from educational acts that must be carried out with substantive, sustained, practical, progressive and reconstructive diligence; (3). Psychology is based on the emotional responsibility of feeling human about something, the correct character, behaviour, and educational actions that should be taken in situations. Four). Sociology is grounded in social responsibility to social status through education. It must be practised in ways that meet the functional needs of society and the stratification of political, economic and social status.

Keywords: educational accountability; leaders; psychology-based accountability; philosophy-based accountability; religion-based accountability; sociology-based accountability.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pemimpin pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi dan sosiologi. (1). berbasis berdasarkan agama kepada Allah SWT sebagai akibat dari suatu tindakan pendidikan yang harus adil, baik hati, memuaskan, tidak menipu, tidak melanggar aturan dan tidak bertentangan dengan dirinya sendiri; (2). berbasis filsafat adalah tanggung jawab mental untuk aturan berpikir logis akibat dari suatu tindakan pendidikan yang harus dilakukan dengan hati-hati substansial, abadi, pragmatis dan progresif dan rekonstruktif; (3). berbasis psikologi adalah tanggung jawab emosional untuk merasakan manusia tentang sesuatu tindakan pendidikan yang harus dilakukan dengan hati-hati karakter, perilaku, dan situasi yang tepat di sekitarnya, (4). berbasis sosiologi adalah tanggung jawab sosial atas kedudukan sosial melalui pendidikan, harus dilakukan dengan cara yang memenuhi kebutuhan fungsional masyarakat, stratifikasi status politik, ekonomi dan sosial.

Kata kunci: akuntabilitas berbasis agama; akuntabilitas berbasis filsafat; akuntabilitas berbasis psikologi; akuntabilitas berbasis sosiologi; akuntabilitas pendidikan; pemimpin.



PENDAHULUAN

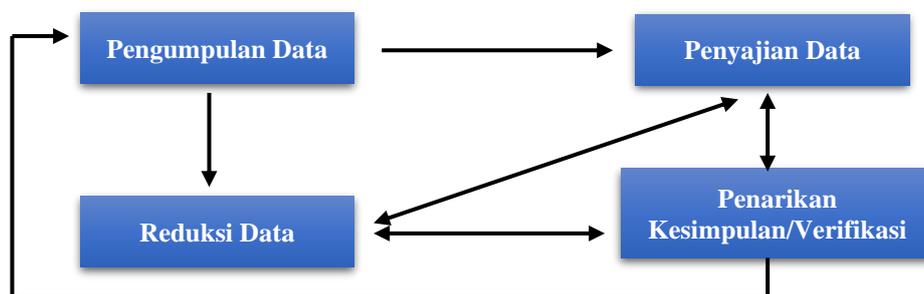
Perubahan zaman yang semakin maju telah menyebabkan perubahan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Meningkatkan mutu sekolah pada hakekatnya merupakan strategi untuk meningkatkan mutu pengajaran dengan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada sekolah, yang mencakup keterlibatan individu baik staf sekolah maupun anggota masyarakat (Handoyo et al., 2021; Siburian & Alamsyah, 2021; Suryana et al., 2022). Peningkatan mutu merupakan kerja keras yang harus didukung oleh seluruh warga sekolah. Kualitas sebuah sekolah tidak hanya tercermin dari bagaimana kinerja sekolah tersebut dan lulusan seperti apa yang dihasilkannya (Mere, 2021; Nurhayati & Kasidi, 2021). Namun demikian, mutu sekolah juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah, bagaimana pendidikan dikelola dengan memberikan pelayanan kepada konsumen pendidikan, dengan memperhatikan faktor yang berkembang (Noprika et al., 2020; Triwijayanti et al., 2022).

Kualitas pembelajaran di sekolah tercermin dari kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, maka hal pertama yang perlu diperbaiki adalah kualitas pembelajaran. Dalam hal ini kemampuan guru dalam mengarahkan proses pembelajaran harus ditekankan, agar proses pembelajaran menjadi inovatif dan kreatif. Hal ini merupakan bentuk nyata dari kegiatan pendidikan yang sesungguhnya dari mana siswa memperoleh pengalaman belajar. (Kurniawan & Hasanah, 2021; Sutarni & Saptu, 2020) Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pembelajaran, penanggung jawab pendidikan sendiri

telah banyak melakukan kegiatan yang inovatif dan kreatif. Misalnya, peningkatan kualifikasi guru melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, perbaikan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru, dll (Bintoro & Fitrianto, 2019; Handayani, 2020).

Untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, guru harus menyiapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Berkaitan dengan hal tersebut, kurikulum jelas memegang peranan penting dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Dalam hal ini, mutu pendidikan tergantung pada bagaimana pembelajaran dilakukan dan kurikulum yang diterapkan. Pendidik memiliki kewajiban untuk menerapkan kegiatan inovatif dan kreatif di kelasnya, selain menerapkan produk inovatif yang diperlukan, guru memiliki kewajiban untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilannya sebagai pendidik yang berkualitas. Mutu dalam konteks pendidikan meliputi konsep mutu input pendidikan, input proses, proses dan output. (Nugraha et al., 2018; Sy, 2022; Turmidzi, 2021).

Oleh karena itu, peran pemimpin lembaga pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang dan mendorong akuntabilitas pemimpin pendidikan membutuhkan pendekatan yang holistik yang melibatkan partisipasi masyarakat, pengukuran kinerja yang komprehensif, dan pengembangan profesionalisme pemimpin pendidikan. Para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan harus bekerja sama untuk mengimplementasikan pendekatan, guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih akuntabel. (Juliati et al., 2018; Sugiat, 2020)



Gambar 1. Proses Analisis Data Miles dan Hubarman (Anwar et al., 2022)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan menggunakan teknik *library research* (Sidiq et al., 2019), materi dianalisis menggunakan paradigma analisis Miles dan Hubarman. Proses teknis keempat analisis data ini ditunjukkan pada gambar 1. Objek formal dalam penelitian ini berupa data yaitu data yang berhubungan dengan tinjauan kritis kajian terhadap Akuntabilitas Pemimpin Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi dan Sosiologi, sedangkan objek materialnya berupa sumber data dalam hal ini adalah tinjauan kritis kajian terhadap Akuntabilitas Pemimpin Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi dan Sosiologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama

Dalam agama Islam, banyak ayat Al-Quran yang menjadi basis akuntabilitas pendidikan, antara lain dalam Q.S., Al-Qiyamah: 36, dan Q.S. Al-Isra: 36. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa akuntabilitas pendidikan adalah perintah/persyaratan yang mengikat dari sang Khalik untuk setiap

mahluk. Kewajiban setiap orang kepada Allah SWT adalah tanggung jawab rohani karena sikapnya sendiri atau karena pihak lain yang dipimpinnya dimanapun dan kapanpun. Setiap orang harus siap untuk memikul beban atau membawa semuanya sesuatu, tidak hanya berupa pahala, tetapi juga berupa azab dari Tuhan sesuai kebutuhan atau dibebankan. (Anwar et al., 2022).

Menurut Q.S. Al-Nahl: 90, dua prinsip penting dalam melakukan akuntabilitas pendidikan diantaranya: (1) wajib berlaku adil, dan (2) haram berlaku keji. (Anwar et al., 2022). Dapat ditarik kesimpulan tentang tanggung jawab berbasis agama adalah tanggung jawab spiritual setiap orang adalah kepada Allah SWT untuk tindakan pendidikannya, yang harus adil, ihsan, memuaskan, tidak mengecewakan, tidak melanggar aturan, tidak bertentangan dengan aturan Allah SWT. Sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan sudah seharusnya memiliki pandangan, asumsi, dan pemikiran serta keyakinan yang kuat dari segi spiritual untuk menjawab tantangan dinamika pendidikan mendatang. Keyakinan dan bimbingan spiritual mewajibkan pendidikan dikelola dengan baik tanpa melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan setiap tindakan berupa kreativitas dan inovasi dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Filsafat

Banyak filsafat yang dapat dipilih sebagai landasan akuntabilitas pendidikan, antara lain cara berpikir (Kristiawan, 2016):

1. *Essensialisme* yang memusatkan perhatian intelektualnya pada gagasan dan informasi yang realistik, menuntut pendidikan dipandang secara ideal (dari segi ide/nilai) dan realistik (faktual/tidak manipulatif);
2. *Perennialisme* yang menitikberatkan perhatian intelektualnya pada keabadian, dimana pendidikan harus dipandang secara kontinyu/permanen (bukan sementara/disingkat);
3. *Pragmatisme* dan *Progresivisme* mengalihkan perhatian intelektualnya pada hal-hal praktis dan maju, di mana pendidikan harus dipertimbangkan sesuai dengan praktik aktual dan untuk kemajuan yang lebih baik; dan
4. *Rekonstruksionisme* yang memfokuskan perhatian intelektualnya pada upaya rekonstruksi, dengan tanggung jawab yang ditujukan untuk memulihkan/meningkatkan kualitas pendidikan saat ini.

Aliran filsafat yang menjadi pedoman akuntabilitas pendidikan diantaranya (Saidah, 2020):

1. *Essensialisme* mensyaratkan agar landasan pendidikan didasarkan pada nilai-nilai esensial, yaitu nilai-nilai yang teruji oleh waktu, membimbing dan ditransmisikan dari generasi ke generasi, dimulai dengan Renaisans;
2. *Perennialisme* menginginkan pendidikan dipusatkan pada upaya pengembangan kemampuan intelektual dengan memberikan pengetahuan yang bersifat abadi, universal, dan tanpa syarat.;
3. *Pragmatisme* dan *Progressivisme* menginginkan agar pendidikan tidak

terfokus pada upaya mentransmisikan pengetahuan teori saja, tetapi pada upaya pragmatis dan progresif untuk melakukan berbagai kegiatan guna memecahkan masalah-masalah yang muncul, dan;

4. *Rekonstruksionisme* merupakan kelanjutan dari gerakan progresif yang hampir sejalan dengan perennialisme yang membutuhkan gerakan untuk mengatasi krisis dalam masyarakat kontemporer. Rekonstruksionisme berusaha untuk menciptakan konsensus yang luas dengan mencari persetujuan semua orang/rakyat terhadap tujuan inti pendidikan secara demokratis, bukan kepada yang diatur atau dikontrol oleh kelompok tertentu.

Filosofi didasarkan pada tanggung jawab setiap orang terhadap aturan berpikir logis karena pelatihannya, apa yang harus dilakukan dengan cara tertentu, pemikiran esensial, jangka panjang, pragmatis dan progresif dan konstruktif. Tanggung jawab pendidikan berbasis filsafat adalah tanggung jawab proses pendidikan yang dilandasi kecintaan menggunakan dan memahami akal sehat, termasuk akal sehat yang dibawa oleh para filosof yang tepat dan sesuai. Sebagai pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan, pemimpin dalam membawa perubahan harus berperan sebagai fasilitator, yaitu kepala sekolah bertugas memberikan dukungan terhadap ide-ide atau inisiasi perubahan yang selaras dengan visi perubahan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai masukan serta saran dari internal maupun eksternal sejalan dengan dinamika pendidikan yang semakin dinamis. (Haeruman, 2019; Sofiarini & Rosalina, 2021)

Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Psikologi

Dari aliran psikologi dapat dijadikan landasan akuntabilitas pendidikan adalah model *Trait-Behaviour-Contingency* (Anwar et al., 2022):

1. *trait model* yang berfokus pada minat emosionalnya pada perilaku di mana tanggung jawab pendidikan adalah sifat yang melekat pada setiap individu dan kelompok;
2. Model perilaku menarik perhatian emosional mereka pada perilaku yang bertanggung jawab secara pedagogis yang menjadi perilaku alami yang melekat pada setiap individu dan kelompok; dan
3. *contingency model* yang menitik-beratkan perhatian emosionalnya pada model situasi lingkungan, dimana tanggung jawab pendidikan merupakan bagian integral dari kebutuhan masyarakat sekitar.

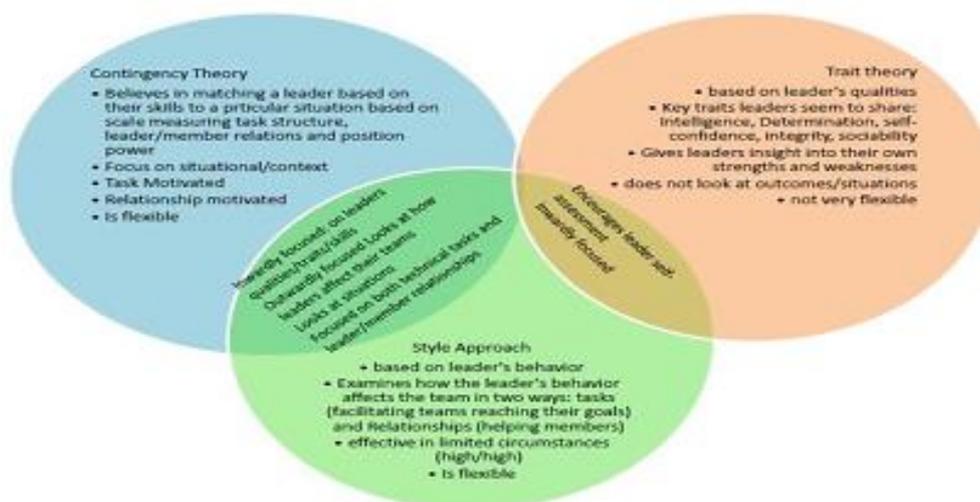
Akuntabilitas pendidikan merupakan pertanggungjawaban untuk pemimpin, maka ketiga model ini erat kaitannya dengan watak dan budi pekerti pemimpin. Mengacu pada hasil penelitian *Rebecca Jewett-Geragosian* dari Granite State Colleges (Anwar et al., 2022) meskipun dalam istilah yang berbeda, tetapi memiliki arti, sifat dan sifat yang sama. karakteristik pemimpin yang bertanggung jawab atas pelatihan dalam ketiga model tersebut adalah:

1. *trait model / trait theory*: Berdasarkan karakteristik pemimpin, pemimpin memiliki karakteristik yang sama kecerdasan, penilaian, kepercayaan, kejujuran dan sosial, kepemimpinan Bersama wawasan tentang kekuatan

dan kelemahan, pemimpin tidak memperhatikan efek/situasi, pemimpin tidak fleksibel;

2. *behavioral model/style approach*: Berdasarkan perilaku pemimpin, mengkaji bagaimana perilaku pemimpin mempengaruhi kelompok dalam dua cara, yaitu orientasi tugas (membantu kelompok mencapai tujuan) dan orientasi hubungan (membantu anggota), yang efektif dalam situasi terbatas; dan
3. *contingency model/contingency theory*: Keyakinan akan kelayakan kemampuan pemimpin untuk bertindak dalam situasi tertentu didasarkan pada struktur dan posisi kekuasaan hubungan tugas-pemimpin-anggota, fokus situasional/kontekstual, motivasi tugas, dan hubungan interpersonal yang termotivasi dan fleksibel, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang akuntabilitas pendidikan berdasarkan psikologi adalah tanggung jawab emosional setiap orang terhadap perasaan kemanusiaan sebagai hasil dari aktivitas pendidikannya, yang dalam arti harus dilakukan memperhitungkan sifat, perilaku, dan situasi yang tepat di sekitarnya. Sebagai pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan menjadi panutan pribadi yang juga jujur dan transparan siap untuk diuji, menjadi teladan berarti menjadi panutan pribadi/ contoh yang bersedia menanggung apa pun risiko, dan menjadi pribadi yang mampu menanggung beban keadaan masyarakat yang mewakilinya dan siap mengevaluasinya kapan saja,



Gambar 2. Styles and Traits Theory by Rebecca Jewett-Geragosian (Anwar et al., 2022)

Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Sosiologi

Aliran sosiologi yang dapat menjadi landasan tanggung jawab pendidikan adalah fungsionalisme struktural, dengan tokoh-tokoh seperti Emile Durkheim dan Talcott Parsons yang gagasan intinya adalah sistem sosial seperti organ tubuh. Tanggung jawab terhadap pendidikan dipandang sebagai prasyarat terbentuknya hierarki stratifikasi sosial. Tanggung jawab pendidikan bekerja dalam sistem berlapis dan semuanya tergantung pada kebutuhan sistem sosial. Pendek kata, tanggung jawab orang tua merupakan syarat suatu sistem stratifikasi sosial, bukan sebagai pribadi dengan “status” tertentu melainkan dalam sistem status sosial. Setiap posisi diwakili seperti organ tubuh, jantung, hati dan ginjal. Jadi. Semua organ bekerja untuk memenuhi kebutuhan fungsional tubuh. Jika posisi sosial tidak berfungsi, sistem sosial menjadi serba salah dan masyarakat mengalami kekacauan. (Widuri, 2021)

Menurut sosiologi *fungsionalisme structural* ada tiga bentuk stratifikasi yang berkaitan dengan tanggung jawab

pendidikan, yaitu:

1. stratifikasi politik, yaitu anggota masyarakat berdasarkan tingkat kekuasaannya, termasuk kasta, oligarki, dan demokrat. Lapisan politik ini terdiri dari kelompok elit dari beberapa penguasa. Para penguasa ini dan anggotanya memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengatur gerak masyarakat. Pada umumnya jenis kekayaan kelas penguasa ini terjadi dalam sistem sosial yang hidup dalam pemerintahan feodal dan otoriter, namun terus terjadi dalam pemerintahan yang demokratis, terutama di lembaga birokrasi negara dan lembaga swasta lainnya yang mengikuti hierarki organisasi. Pada dasarnya kehormatan seseorang diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya;
2. stratifikasi ekonomi, yaitu anggota masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan materi yang termasuk kelas atas (kehidupan berlebihan), sedang (hidup berkecukupan) dan rendah (hidup kurang/miskin). Stratifikasi ekonomi ini biasanya

- merupakan lapisan atas dihuni oleh individu/kelompok yang dapat memperoleh kekayaan finansial dalam jumlah banyak, sedangkan lantai bawah ada yang tidak berhasil mengumpulkan sejumlah besar kekayaan finansial. Pada dasarnya suatu kehormatan seseorang diukur dari berapa banyak kekayaan yang dia miliki; dan
3. stratifikasi status sosial, yaitu anggota masyarakat berdasarkan kehormatan, termasuk gelar kebangsawanan, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan (sangat tinggi, mis dan dosen, setinggi SMA dan mahasiswa, sedang SMA, rendah seperti sekolah dasar dan menengah dan buta huruf). Menurut sosiolog terkenal *Max Weber*, pada stratifikasi status sosial ini memungkinkan seorang individu memainkan berbagai pola interaksi sosial yang membuatnya menjadi pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran jika individu/kelompok memiliki lebih dari satu status (posisi sosial) dalam kehidupan masyarakat pembentuknya lebih dihormati dan dihargai. Pada dasarnya kehormatan seseorang diukur dari seberapa besar kebangsawanan, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan

Akuntabilitas pendidikan didasarkan pada pemahaman sosiologi berarti tanggung jawab atas proses pendidikan berbasis pengetahuan sosial, termasuk produk pemikiran sosiolog yang terarah dan sesuai dengan tujuan. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pendidikan berbasis sosiologi adalah tanggung jawab sosial setiap orang kepada posisi masyarakat akibat perbuatan edukasinya, yang timbul dari kegiatan pendidikan dan harus diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan fungsional

masyarakat, dan stratifikasi politik, ekonomi dan status sosial. Sebagai seorang pemimpin pada sebuah lembaga pendidikan yang memegang kekuasaan maka selalu mempertimbangkan masukan dan saran dari berbagai status sosial masyarakat demi menjawab dinamika pendidikan ke depan, pemimpin dapat bekerja sama ia dapat dimintai bantuan, pendapat dan kerjasama untuk kepentingan program lembaga pendidikan, pemimpin mampu mengelola sumber daya dan potensi seluruh warga lembaga pendidikan dari seluruh posisi dan status sosial.

SIMPULAN

Akuntabilitas pendidikan dapat disimpulkan: (1) berdasarkan agama sebagai hasil pendidikan yang adil, baik, memuaskan, tidak menipu, tidak melawan aturan, dan tidak bertentangan; (2) tanggung jawab intelektual berbasis filosofis terhadap kaidah penalaran hasil pendidikan dilakukan dengan ketekunan yang esensial, abadi, pragmatis, dan progresif serta konstruktif; (3) tanggung jawab emosional berbasis psikologi untuk merasakan kemanusiaan dalam kaitannya dengan kegiatan pendidikan yang akan dilakukan sesuai dengan karakter, perilaku dan situasi yang sesuai; dan (4) berdasarkan sosiologi, tanggung jawab sosial status sosial melalui pendidikan, harus dilaksanakan dengan cara memenuhi kebutuhan fungsional masyarakat dan stratifikasi status politik, ekonomi, dan sosial. Peran pemimpin yang akuntabel sebagai pemimpin perubahan yaitu pertama berperan untuk menentukan visi, misi, serta arah dan target yang ingin dicapai lembaga sekaligus sebagai penanggungjawab atas semua program dan kegiatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., Saifullah, I., Mighwar, M. Al, & Nurjaman, U. (2022). Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agma, Filsafat, Psikologi dan Sosiologi. *Al Afkar, Journal for Islamic Studies*, 5(1), 101–115
- Bintoro, R. F. A., & Fitrianto, Y. (2019). Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Kalimantan Timur (Studi Kasus di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kabupaten Kutai Timur). *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 36-46.
- Handayani, H. S. (2020). Penerapan Balanced Scorecard Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pro Guru*, 6(3), 5–24.
- Handoyo, K., Mudhofir, M., & Maslamah, M. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 321-332.
- Haeruman, A. (2019). Praktik Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Islam. *Madrassa*, 2(2), 61-67.
- Juliati, J., Firman, M., & Nugraha, D. (2018). Improving Mathematical Communication Capabilities By Realistic Mathematics Approach. *(Jiml) Journal of Innovative Mathematics Learning*, 1(3), 338
- Kristiawan, M. (2016). *Filsafat 2016*.
- Kurniawan, H., & Hasanah, E. (2021). Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Inovasi dan Kreativitas Guru di Masa Pandemi di SD Muhammadiyah Bantul Kota. *Jurnal studi guru dan pembelajaran*, 4(1), 56-66.
- Mere, K. (2021). Dampak Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah terhadap Kinerja Kepala Sekolah. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 4306-4313.
- Noprika, M., Yusro, N., & Sagiman, S. (2020). Strategi Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 224-243.
- Nugraha, D., Ginanjar, H., & Rolina, R. (2018). Problem Solving Ability and Problem Based Learning. *(Jiml) Journal of Innovative Mathematics Learning*, 1(3), 239
- Nurhayati, A., & Kasidi, K. (2021). Implementasi Pilar-Pilar Manajemen Mutu Sekolah di SMP Multazam Semarang Berbasis Pesantren. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, 2(1), 22-29.
- Saidah, A. H. (2020). Pemikiran Essensialisme, Eksistensialisme, Perennialisme, dan Pragmatisme dalam Perspektif Pendidikan Islam. *AL ASAS*, 5(2), 16-28.
- Siburian, M. F., & Alamsyah, M. (2021, July). Analisis Kepemimpinan Kepala Sekolah. In *SINASIS (Seminar Nasional Sains)* (Vol. 2, No. 1).
- Sidiq, Umar, Choiri, & Mi. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53).
- Sofiarini, A., & Rosalina, E. (2021). Analisis Kebijakan dan

- Kepemimpinan Guru Dalam Menghadapi Kurikulum 2013 Era Globalisasi. *Jurnal Basicedu*, 5(2), 724-732.
- Sugiat, M. A. (2020). Pengembangan Sdm Unggul Berbasis Collaborative Strategic Management. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 1-9.
- Suryana, N., Mumuh, M., & Hilman, C. (2022). Konsep Dasar dan Teori Partisipasi Pendidikan. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 61-67.
- Sutarni, S., & Sapta, A. (2020). Meningkatkan hasil belajar matematika dengan menerapkan metode drill. *Jurnal Pena Edukasi*, 7(1), 1-8.
- Sy, S. H. (2022). Urgensi Mutu pada Lembaga Pendidikan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 697-706.
- Turmidzi, I. (2021). Implementasi supervisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. *Tarbawi: Jurnal pemikiran dan Pendidikan Islam*, 4(1), 33-49.
- Triwijayanti, N., Sanoto, H., & Paseleng, M. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan Pendidikan, Budaya Sekolah, Citra Sekolah Terhadap Kepuasan Orang Tua. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 12(1), 74-80.
- Widuri, D. R. (2021). Hubungan Antara Demokrasi dan Kesejahteraan Warga di Eropa: Analisis European Social Survey 2002-2018. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 306-318.